



EDUKASI MASYARAKAT MENGENAI BAHAYA DAN IDENTIFIKASI KONTEN PALSU

Ahmad Rois Syujak¹, Budiyaniti², Ansari³, Ulya Ilhami Arsyah⁴

¹Teknologi Informasi, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Salatiga

²Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

³Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, USK PSDKU Gayo Lues

⁴Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Padang

ahmad.rois.syujak@uinsalatiga.ac.id, budiyaniti1964@gmail.com, ansarise_psdku@usk.ac.id,
ulya@pnp.ac.id

Abstrak

Penyebaran konten palsu (hoaks) yang semakin masif di tengah masyarakat menjadi tantangan serius dalam era digital. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian warga mudah terpengaruh dan turut menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Untuk merespons permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan edukasi tentang bahaya serta cara mengidentifikasi konten palsu di media digital. Kegiatan dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Bandung dengan peserta sebanyak 45 orang yang mayoritas merupakan anggota Karang Taruna. Metode pelaksanaan meliputi koordinasi dan perizinan kepada aparat desa, pelaksanaan kegiatan edukatif secara interaktif, serta diskusi dan simulasi verifikasi informasi. Sesi diawali dengan ice breaking, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dan diskusi partisipatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian peserta terbiasa menerima dan menyebarkan pesan berantai tanpa verifikasi, dan merasa khawatir terhadap tautan yang berpotensi meretas data pribadi. Salah satu kasus yang dibahas adalah penyebaran informasi palsu mengenai pembegalan di Desa Cangkorah, yang ternyata merupakan rekayasa pribadi karena masalah pinjaman online. Kegiatan ini mendapat respon positif dan menumbuhkan kesadaran pentingnya bersikap kritis terhadap informasi digital. Disarankan agar peserta yang hadir dapat menyampaikan kembali pengetahuan kepada warga lain, serta masyarakat lebih waspada dan sabar dalam menyebarkan informasi agar tidak menimbulkan keresahan yang tidak perlu.

Kata kunci: literasi digital, hoaks, edukasi masyarakat, konten palsu, PKM

Abstract

The widespread dissemination of false content (hoaxes) has become a significant challenge in today's digital era. Limited digital literacy makes some individuals easily influenced and more likely to share unverified information. To address this issue, a Community Service Program (PKM) was conducted with the aim of educating residents about the dangers of digital hoaxes and how to identify them. The activity was held in a village in Bandung Regency, involving 45 participants, the majority of whom were members of the local youth organization (Karang Taruna). The method included obtaining permission and coordination with village authorities, delivering interactive educational sessions, and conducting group discussions and fact-checking simulations. The session began with an ice-breaking activity to foster engagement, followed by the presentation of materials and participatory discussion. The results showed that many participants were accustomed to receiving and forwarding chain messages without verification and expressed concern about suspicious links that might compromise personal data. A notable case discussed was the viral spread of a false robbery incident in Cangkorah Village, which was later revealed to be fabricated by the individual involved due to online loan issues. This activity received positive feedback and raised participants' awareness of the need to be more critical of digital information. It is recommended that those who attended share their knowledge with others, and that the broader community exercise greater caution and patience when handling information to avoid unnecessary panic or social tension.

Keywords: *digital literacy, hoax, community education, false content, community service*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses, menyebarkan, dan mengonsumsi informasi (Fauzi, et al, 2023; Habibah et al, 2021; Setyawan et al, 2025). Kehadiran media sosial, platform berita daring, dan aplikasi komunikasi digital memungkinkan arus informasi mengalir begitu cepat dan luas, melintasi batas geografis dan sosial (Wahyuanto, 2025). Namun, di balik kemudahan ini, muncul tantangan serius yang mengancam kualitas informasi yang diterima masyarakat (Suhendra & Pratiwi, 2024; Sarijito, 2024), salah satunya adalah penyebaran konten palsu atau hoaks. Konten palsu tidak hanya mencakup berita bohong semata, tetapi juga berbagai bentuk manipulasi informasi seperti foto yang diedit, kutipan yang dipelintir, atau narasi yang disengaja untuk menyesatkan. Dalam penelitiannya Novyanti & Astuti (2024) menyatakan bahwa ada konsekuensi hukum pidana bagi penyalahgunaan aplikasi *deepfake*. Masifnya penyebaran konten semacam ini berpotensi merusak tatanan sosial, memicu kepanikan, hingga mempengaruhi keputusan politik dan ekonomi. Beberapa kasus di Indonesia bahkan menunjukkan bagaimana konten palsu dapat memicu konflik horizontal, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, dan memengaruhi persepsi publik terhadap isu-isu strategis (Amiruddin, 2022; Arifianto & Toisuta, 2023).

Rendahnya literasi digital di sebagian besar masyarakat turut memperparah situasi ini. Banyak individu belum memiliki keterampilan dasar untuk memverifikasi informasi yang mereka terima atau bagikan. Dalam banyak kasus, informasi diterima secara pasif tanpa proses evaluasi kritis, apalagi pencarian sumber alternatif. Hal ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan kelompoknya, baik untuk kepentingan politik, ekonomi, maupun ideologis (Wardle & Derakhshan, 2017). Keresahan terhadap penyebaran konten palsu ini semakin kuat ketika melihat dampak riil di masyarakat, seperti pergesekan antarwarga akibat isu yang tidak jelas kebenarannya, kericuhan yang dipicu oleh informasi menyesatkan, hingga tumbuhnya ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga formal. Jika dibiarkan berlarut kondisi ini dapat melemahkan ikatan sosial dan menciptakan ketegangan yang merusak ketenangan hidup bermasyarakat. Kekhawatiran ini menjadi landasan perlunya langkah-langkah preventif dan edukatif secara langsung kepada masyarakat.

Karena itu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini diinisiasi sebagai langkah awal untuk memberikan edukasi mengenai bahaya dan identifikasi konten palsu. Melalui pendekatan partisipatif kegiatan ini memiliki tujuan untuk membangun kesadaran kritis dan keterampilan praktis masyarakat dalam menyaring informasi, serta menumbuhkan budaya literasi digital yang sehat dan bertanggung jawab. Sehingga masyarakat dapat tetap mengakses serta meneruskan informasi atau pesan-pesan secara bijak.

B. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di salah satu desa yang terletak di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan aksesibilitas, kebutuhan masyarakat terhadap literasi digital, serta ketersediaan kelompok sasaran yang relevan. Kegiatan diikuti oleh sebanyak 45 warga, yang mayoritas merupakan anggota Karang Taruna setempat dengan rentang usia 17 hingga 35 tahun. Kelompok ini dipilih karena secara demografis merupakan pengguna aktif media sosial dan memiliki potensi sebagai agen literasi di lingkungannya. Sebelum pelaksanaan kegiatan, tim pengabdian terlebih dahulu melakukan koordinasi dan meminta izin resmi kepada pihak desa, dalam hal ini melalui kepala desa dan pengurus Karang Taruna. Proses koordinasi ini tidak hanya untuk mendapatkan legalitas kegiatan, tetapi juga sebagai bentuk pendekatan awal agar kegiatan dapat diterima dan

didukung oleh masyarakat lokal. Selain itu, tim juga melakukan survei singkat dan diskusi informal untuk menggali persepsi awal masyarakat mengenai isu konten palsu.



Gambar 1. Peserta mengikuti edukasi dalam kegiatan PKM

Kegiatan PKM dirancang dalam bentuk edukasi interaktif yang dikemas secara partisipatif. Rangkaian acara diawali dengan sesi ice breaking untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan antara peserta dan tim pelaksana. Ice breaking dilakukan melalui permainan kelompok ringan yang sekaligus mengandung unsur informasi digital sebagai pengantar topik. Setelah suasana lebih cair dan peserta mulai aktif, barulah kegiatan inti dimulai. Materi utama disampaikan secara komunikatif dengan menggunakan media visual (slide presentasi dan video pendek) yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Dalam penyampaiannya, fasilitator mendorong peserta untuk aktif berdiskusi, berbagi pengalaman pribadi terkait menerima atau menyebarkan konten palsu, serta melatih keterampilan mengenali ciri-ciri informasi yang tidak valid. Metode tanya jawab, diskusi kelompok kecil, dan simulasi verifikasi fakta juga digunakan agar peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi turut berpikir kritis dan terlibat secara aktif.

Sepanjang kegiatan, keaktifan warga terlihat cukup tinggi. Hal ini tercermin dari antusiasme dalam merespons pertanyaan, keterlibatan dalam diskusi, serta kesediaan berbagi pengalaman pribadi yang berhubungan dengan topik. Di akhir kegiatan, dilakukan evaluasi singkat melalui refleksi bersama dan pengisian lembar umpan balik (feedback form), untuk menilai pemahaman peserta serta mendapatkan masukan untuk perbaikan kegiatan serupa di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari pelaksanaan kegiatan edukasi ini, diperoleh berbagai temuan menarik terkait pola konsumsi informasi masyarakat, khususnya di kalangan anggota Karang Taruna. Sebagian besar peserta mengaku cukup aktif menerima dan menyebarkan pesan berantai, baik melalui WhatsApp maupun media sosial lainnya. Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa informasi yang mereka teruskan belum tentu memiliki kebenaran atau validitas. Bahkan,

beberapa peserta menyatakan bahwa sering kali mereka menekan tombol "teruskan/*forward*" tanpa membaca isi pesan secara utuh, atau hanya karena pesan tersebut datang dari orang yang dianggap terpercaya. Menariknya dari temuan Dewi & Puspita (2020) pola keinginan untuk membagikan pesan di WhatsApp didorong oleh beberapa faktor, antara lain keinginan untuk berbagi informasi yang dianggap bermanfaat, menjaga hubungan sosial, menunjukkan kepedulian terhadap orang lain. Hal ini pun didukung oleh temuan Sahroni & Irawaty (2021) bahwa di kalangan mahasiswa pesan berantai ini dikarenakan adanya kerendahan hati mahasiswa untuk membagikan kembali informasi berdasarkan faktor emosional, tekanan dari lingkungan pertemanan, serta tingkat kepercayaan terhadap sumber yang mengirimkan pesan. Dalam diskusi, muncul pula kekhawatiran terkait keamanan digital, terutama yang berkaitan dengan tautan (link) mencurigakan. Beberapa peserta menceritakan pengalaman menerima pesan yang mengandung link tidak jelas, yang jika tidak sengaja diklik akan menimbulkan rasa takut akan kemungkinan pembobolan rekening atau penyalahgunaan data pribadi (Bupu, et al, 2024). Kekhawatiran ini menjadi indikasi bahwa sebagian masyarakat mulai memiliki kesadaran akan risiko dunia digital, meskipun masih belum sepenuhnya dibarengi dengan pengetahuan yang cukup untuk mengantisipasi atau memverifikasinya.

Salah satu momen yang menarik sekaligus mengundang tawa dalam sesi diskusi adalah ketika seorang peserta menceritakan kasus yang sempat heboh di kampung sebelah, yakni dugaan pembegalan yang viral di Desa Cangkorah, Bandung Barat. Kisah tersebut sempat tersebar luas di grup WhatsApp warga dan menimbulkan keresahan, terutama karena disebut-sebut pelaku pembegalan masih berkeliaran. Namun, dua hari kemudian terungkap bahwa korban yang mengaku kehilangan uang sebesar enam juta rupiah ternyata menggunakan dana tersebut untuk membayar pinjaman online (pinjol) tanpa sepengetahuan istrinya. Karena takut dimarahi, ia mengarang cerita seolah-olah dibegal. Kasus ini terbongkar saat dilakukan reka ulang oleh pihak Polres Cimahi, dan rekamannya sempat viral. Bahkan media online sudah memuat berita ini (Kumparan News, 2025; Febriani, 2025) Meskipun lucu, kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana informasi palsu dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan efek domino sosial sebelum kebenaran terungkap.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi literasi digital sangat diperlukan, karena selain rendahnya kemampuan verifikasi informasi, masyarakat juga belum memiliki pemahaman menyeluruh tentang dampak sosial dan hukum dari menyebarkan informasi palsu. Diskusi-diskusi yang terjadi selama kegiatan juga membuka ruang refleksi bagi peserta, terutama dalam membedakan informasi yang faktual dan hoaks, serta pentingnya bersikap kritis sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Secara keseluruhan, kegiatan PKM ini mendapat sambutan positif dari warga. Mereka menyatakan bahwa kegiatan semacam ini tidak hanya membuka wawasan baru, tetapi juga memberikan rasa aman karena ada pihak yang peduli dan hadir untuk menjelaskan hal-hal yang selama ini hanya dibicarakan secara informal. Ke depan, mereka berharap kegiatan edukatif seperti ini dapat dilakukan secara berkala dengan cakupan peserta yang lebih luas.

D. SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) mengenai edukasi bahaya dan identifikasi konten palsu yang dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Bandung mendapat respon yang sangat positif dari warga, khususnya anggota Karang Taruna. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bentuk-bentuk konten palsu, potensi

dampaknya, serta cara-cara sederhana untuk mengenali dan menyikapi informasi yang beredar di media sosial maupun platform digital lainnya. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta menunjukkan bahwa kegiatan semacam ini sangat dibutuhkan dan diharapkan terus berlanjut secara berkesinambungan.

Kasus viral yang sempat terjadi di Desa Cangkorah, Bandung Barat di mana informasi palsu mengenai pembegalan tersebar dan menimbulkan ketegangan sosial menjadi contoh nyata bagaimana informasi yang tidak terverifikasi dapat menimbulkan keresahan bahkan menodai kepercayaan antarwarga. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi literasi digital bukan hanya soal keterampilan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran sosial, etika bermedia, dan kewaspadaan bersama.

Saran

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini, disarankan agar peserta yang hadir dapat menjadi agen literasi digital di lingkungannya masing-masing, terutama dengan menyampaikan kembali informasi dan pemahaman yang diperoleh kepada warga lain yang tidak dapat hadir dalam kegiatan ini. Dengan demikian, manfaat kegiatan dapat meluas dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat.

Kepada seluruh warga, sangat dianjurkan untuk senantiasa bersikap waspada, kritis, dan sabar dalam menerima serta menyebarkan informasi. Jangan mudah terpancing atau terburu-buru membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya. Setiap informasi sebaiknya ditelusuri lebih dulu dari sumber resmi atau kredibel, agar tidak menimbulkan kegaduhan, keresahan, atau bahkan fitnah, seperti yang terjadi pada kasus di Desa Cangkorah. Informasi palsu tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat menciptakan ketakutan kolektif dan merusak keharmonisan sosial dalam komunitas. Melalui kegiatan edukatif seperti ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih bijak dan bertanggung jawab dalam bermedia digital, serta mampu menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran konten palsu di lingkungan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, L., Rozalinna, G. M., & Anwar, V. L. N. (2022). *Banjir Informasi dan Potensi Konflik Horizontal di Tengah Pandemi. Subjek-Subjek Algoritmik: Perspektif Sosiologi Tentang Dunia*

Digital-Jejak Pustaka, 1, 155.

- Arifianto, Y. A., & Toisuta, J. S. (2023). Media Sosial Dan Perdebatan Politik: Upaya Gereja Mereduksi Konflik Pemilu di Era Digital Dalam Bingkai Etis Teologis. *EULOGIA: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 140-153.
- Bupu, A. G., Medan, K. K., & Amalo, H. (2024). Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(2), 367-383.
- Dewi, N. K., & Puspita, R. (2020). MOTIVASI IBU RUMAH TANGGA MEMBAGIKAN PESAN MELALUI WHATSAPP. *Ikon--Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 68-83.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Harto, B., Dulame, I. M., Pramuditha, P., ... & ST, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Febriani, R. N. (2025, April 24). Uang habis, Dandar pura-pura dibegal. *Pikiran Rakyat*. <https://koran.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-3039267255/uang-habis-dandar-pura-pura-dibegal>
- Habibah, A. F. (2021). Era masyarakat informasi sebagai dampak media baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350-363.
- Kumaran News. (2025, April 23). Uang istri Rp 6 juta habis buat judol, pria di KBB takut lalu ngaku dibegal. *Kumaran*. <https://kumaran.com/kumarannews/uang-istri-rp-6-juta-habis-buat-judol-pria-di-kbb-takut-lalu-ngaku-dibegal-24vrO3Mss7E>
- Novyanti, H., & Astuti, P. (2021). Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Novum: Jurnal Hukum*, 31-40.
- Sahroni, T., & Irawaty, S. (2021). Perilaku Mahasiswa Dalam Menanggapi Informasi Hoaks Di Platform Whatsapp. *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi)*, 2(2), 130-141.
- Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175-186.
- Setyawan, G. P., Fendy, F., & Mantasa, K. (2025). Perpustakaan Di Era Digital: Menjaga Eksistensi Di Tengah Dominasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Journal Papyrus: Sosial, Humaniora, Perpustakaan Dan Informasi*, 4(1), 49-58.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *In Iapa Proceedings Conference* (pp. 293-315).
- Wahyunto, Eko. (2025). *Manajemen Komunikasi Digital*. CV. Mitra Edukasi Negeri.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking (Vol. 27, pp. 1-107). *Strasbourg: Council of Europe*.